

## Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Pembangunan Wilayah

Nurhayati Selviana Putri<sup>1</sup>, Muthia Nazwa<sup>2</sup>, Akrom<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [selviana.27@gmail.com](mailto:selviana.27@gmail.com)<sup>1</sup>, [muthianazwa944@gmail.com](mailto:muthianazwa944@gmail.com)<sup>2</sup>

### Informasi

### Abstract

Volume : 3  
Nomor : 6  
Bulan : Juni  
Tahun : 2026  
E-ISSN : 3062-9624

*Population growth is a demographic phenomenon that has a dual influence on regional development in Indonesia. On one hand, high population growth can serve as a fundamental asset for development if it is balanced with improvements in human resource quality, equitable fiscal distribution, and adaptive spatial planning. On the other hand, uncontrolled population growth exacerbates interregional disparities, reduces the quality of public services, worsens environmental degradation, and hinders the achievement of sustainable development. This article aims to analyze the influence of population growth on regional development by focusing on development inequality, the impacts of decentralization and regional autonomy, inequality in education and public welfare, regional economic development planning, as well as the evaluation of energy and environmental policies. The method used is library research with a qualitative approach, examining various literature including books, scientific journals, official reports, and policy documents. The findings indicate that decentralization without strengthening demographic analysis capacity, poorly managed demographic dividends, and energy policies that are not aligned with population pressure are the main causes of failure in achieving equitable regional development.*

**Keyword:** *population growth, regional development, decentralization, demographic dividend, inequality*

### Abstrak

*Pertumbuhan penduduk merupakan fenomena demografi yang memberikan pengaruh ganda terhadap pembangunan wilayah di Indonesia. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi modal dasar pembangunan apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, distribusi fiskal yang adil, serta perencanaan tata ruang yang adaptif. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali justru memperlebar ketimpangan antar wilayah, menurunkan kualitas layanan publik, memperparah degradasi lingkungan, serta menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan wilayah dengan fokus pada ketimpangan pembangunan, dampak desentralisasi dan otonomi daerah, ketimpangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, perencanaan pembangunan ekonomi daerah, serta evaluasi kebijakan energi dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, mengkaji berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi tanpa penguatan kapasitas analisis demografi, bonus demografi yang tidak dikelola dengan baik, serta kebijakan energi yang tidak selaras dengan tekanan penduduk menjadi penyebab utama kegagalan pembangunan wilayah yang berkeadilan.*

**Kata Kunci:** *pertumbuhan penduduk, pembangunan wilayah, desentralisasi, bonus demografi, ketimpangan*

## **A. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk merupakan fenomena demografi yang tak terelakkan di hampir seluruh wilayah di dunia, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, pangan, serta ruang hunian yang layak, berpotensi menjadi beban berat bagi pembangunan wilayah. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk juga dapat menjadi modal dasar pembangunan apabila penduduk tersebut memiliki kualitas tinggi dan tersebar secara merata. Oleh karena itu, hubungan antara dinamika kependudukan dan pembangunan wilayah bersifat dialektis, bagaikan dua sisi mata uang yang saling mempengaruhi: bisa menjadi mesin penggerak ekonomi sekaligus pemicu berbagai masalah struktural jika salah dikelola. (Santi & Iskandar, 2021)

Secara teoritis, pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan wilayah dapat dianalisis melalui beberapa perspektif, mulai dari teori Malthusian yang pesimistis hingga teori demografi modern yang lebih optimistis. Teori Malthus misalnya, mengkhawatirkan bahwa pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur akan melampaui pertumbuhan produksi pangan yang mengikuti deret hitung, sehingga menyebabkan kemiskinan dan bencana kelaparan. Sebaliknya, teori modern seperti yang dikemukakan oleh Ester Boserup justru menyatakan bahwa tekanan penduduk dapat mendorong inovasi teknologi pertanian dan intensifikasi sumber daya. (Ardiansyah, 2025). Dalam konteks pembangunan wilayah, perdebatan ini relevan untuk memahami mengapa beberapa daerah dengan kepadatan tinggi seperti Jakarta justru tumbuh pesat secara ekonomi, sementara daerah lain dengan tingkat pertumbuhan serupa justru terperosok dalam lingkaran kemiskinan dan degradasi lingkungan.

Fenomena pertumbuhan penduduk di Indonesia menunjukkan pola yang sangat timpang secara spasial. Pulau Jawa yang hanya mencakup sekitar 6-7 persen dari total luas daratan Indonesia, menampung lebih dari 56 persen total populasi nasional. Konsentrasi penduduk yang ekstrem ini menimbulkan konsekuensi ganda terhadap pembangunan wilayah. Di satu pihak, aglomerasi penduduk di wilayah perkotaan besar seperti Jabodetabek menciptakan skala ekonomi dan efisiensi kolektif yang menarik investasi, memicu pertumbuhan sektor jasa dan industri. Di lain pihak, tekanan penduduk yang sangat tinggi mengakibatkan urban sprawl, kemacetan kronis, kelangkaan air bersih, serta beban infrastruktur yang melampaui kapasitas desain awal. Sebaliknya, wilayah-wilayah di luar Jawa seperti Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua justru mengalami kekurangan penduduk yang menghambat pembentukan pusat-pusat

pertumbuhan baru, sehingga pembangunan wilayah menjadi sangat tidak seimbang antar pulau. (Tirta & Putri, 2025)

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengupas secara mendalam berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk terhadap proses pembangunan wilayah, baik dari aspek positif maupun negatif. Analisis akan mencakup dampak terhadap ketersediaan lahan, ketahanan pangan, kualitas lingkungan hidup, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan, hingga produktivitas ekonomi regional. (Azaria, 2023). Lebih dari sekadar mengidentifikasi masalah, artikel ini juga akan menyoro strategi pengelolaan pertumbuhan penduduk yang berbasis pada perencanaan wilayah yang adaptif dan berkeadilan. Dengan memahami hubungan kausal dan korelasional antara demografi dan pembangunan, diharapkan para pemangku kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya reaktif terhadap lonjakan penduduk, tetapi juga proaktif dalam menciptakan wilayah-wilayah baru yang seimbang dan berkelanjutan. Melalui paparan berikut, kita akan melihat bahwa kunci pembangunan wilayah bukanlah pada menghentikan pertumbuhan penduduk, melainkan pada bagaimana mengarahkan distribusi dan meningkatkan kualitas penduduk agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Metode kepustakaan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep-konsep teoritis serta bukti-bukti empiris mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah tanpa melakukan pengambilan data langsung di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder yang relevan, meliputi buku teks demografi dan perencanaan wilayah, jurnal ilmiah nasional maupun internasional terindeks, laporan resmi lembaga pemerintah seperti Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen kebijakan tata ruang dan pembangunan daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran daring (online) menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan JSTOR, dengan kata kunci utama "pertumbuhan penduduk", "pembangunan wilayah", "teori Malthus", "teori Boserup", "daya dukung lingkungan", serta "distribusi spasial penduduk".

Seluruh literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas sumber, serta tahun terbit (prioritas pada sepuluh tahun terakhir kecuali untuk literatur klasik yang menjadi rujukan teori dasar). Analisis data dalam studi kepustakaan ini

dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) yang sistematis dan kritis. Setelah seluruh literatur terkumpul, peneliti melakukan reduksi data dengan memilah informasi yang secara langsung membahas pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap indikator-indikator pembangunan wilayah seperti produk domestik regional bruto (PDRB), ketersediaan infrastruktur, kualitas lingkungan, akses layanan publik, dan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk matriks sintesis untuk membandingkan temuan dari berbagai sumber, baik yang mendukung maupun yang bertentangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui metode berpikir deduktif-induktif, yakni menarik generalisasi dari teori-teori umum yang telah ada serta menyusun pola hubungan kausal berdasarkan bukti-bukti spesifik yang ditemukan di berbagai wilayah. Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari minimal tiga literatur berbeda sebelum dirumuskan sebagai temuan. Dengan metode kepustakaan yang sistematis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai kompleksitas hubungan antara dinamika kependudukan dan pembangunan wilayah.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaruh Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan distribusi sumber daya fiskal memperlebar ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Provinsi-provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara justru mengalami ketimpangan pembangunan ekonomi yang lebih tajam karena peningkatan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal (Azim, Sutjipto, & Ginanjar, 2022). Di Sulawesi Utara, wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi menikmati akses infrastruktur dan layanan publik yang jauh lebih baik dibandingkan wilayah pedesaan yang mengalami pertumbuhan penduduk rendah (Maramis, 2021).

Kebijakan desentralisasi yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan justru memperparah kesenjangan ketika daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai (Santi & Iskandar, 2021). Ketimpangan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah Sumatera bagian selatan sangat dipengaruhi oleh pergeseran sektoral ekonomi yang tidak mampu mengakomodasi lonjakan penduduk usia produktif (Anriyani, 2025). Akibatnya, daerah dengan pertumbuhan penduduk cepat tetapi struktur

ekonomi lemah terjebak dalam lingkaran kemiskinan, sementara daerah dengan pertumbuhan penduduk stabil mampu mengalokasikan belanja pembangunan secara lebih efektif.

### **Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Implementasi desentralisasi di Indonesia sejak 2001 belum sepenuhnya berhasil mengelola dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan wilayah. Banyak daerah otonom baru justru mengalami kesulitan dalam perencanaan tata ruang karena lonjakan penduduk yang tidak terprediksi (Ardiansyah, 2025). Kinerja desentralisasi sangat bervariasi antar daerah; kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk moderat (1-1,5 persen per tahun) cenderung lebih sukses dalam menyediakan infrastruktur dasar dibandingkan daerah dengan pertumbuhan di atas 2 persen per tahun (Baidhowah, 2022). Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan birokrasi daerah dalam menyesuaikan anggaran pembangunan dengan kecepatan penambahan jumlah penduduk.

Desentralisasi dalam kerangka NKRI belum diikuti oleh penguatan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam analisis demografi. Perencanaan pembangunan daerah di era otonomi seringkali mengabaikan proyeksi pertumbuhan penduduk jangka panjang, sehingga rencana tata ruang wilayah (RTRW) cepat usang dan tidak sesuai dengan realita di lapangan (Kholik, 2020). Ketidaksiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi menjadi penyebab utama kegagalan pembangunan berkelanjutan di banyak wilayah Indonesia timur (Yandri, 2024). Dengan kata lain, desentralisasi tanpa disertai penguatan kapasitas perencanaan kependudukan justru memperburuk ketimpangan pembangunan wilayah.

### **Ketimpangan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Pertumbuhan penduduk yang tinggi secara signifikan memperlebar ketimpangan akses pendidikan antar daerah. Daerah dengan pertumbuhan penduduk anak usia sekolah yang pesat tetapi memiliki kapasitas fiskal rendah mengalami defisit anggaran pendidikan yang parah (Runiasih & Ahmad, 2025). Fenomena ini paling mencolok terjadi di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, di mana rasio guru-murid mencapai 1:40 dibandingkan dengan standar nasional 1:25. Desentralisasi fiskal belum mampu mengoreksi ketimpangan ini karena dana perimbangan dari pusat seringkali dihitung berdasarkan data proyeksi penduduk yang sudah usang (Santi & Iskandar, 2021).

Peningkatan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sangat berkorelasi dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka yang disebabkan oleh ledakan angkatan kerja muda (Tirta & Putri, 2025). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis mengurangi ketimpangan sosial apabila pertumbuhan penduduk tidak dikelola dengan kebijakan keluarga berencana dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia (Edison, 2023). Kebijakan desentralisasi belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah yang mengalami tekanan penduduk tinggi karena lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan berbasis demografi (Azaria, 2023).

### **Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh ganda terhadap perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Daerah dengan pertumbuhan penduduk di atas rata-rata nasional (1,25 persen per tahun) cenderung mengalokasikan anggaran lebih besar untuk sektor infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi) sehingga mengurangi ruang fiskal untuk investasi sektor produktif seperti pariwisata dan industri pengolahan (Panjaitan, 2025). Kegagalan dalam membaca dinamika kependudukan menyebabkan banyak pemerintah daerah terjebak dalam kebijakan yang reaktif dan jangka pendek, bukan proaktif dan berkelanjutan (Oktariani, 2021).

Pergeseran sektoral ekonomi dari agraris ke jasa dan industri di wilayah Sumbagsel justru meningkatkan ketimpangan pendapatan karena sektor modern tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar akibat pertumbuhan penduduk yang cepat (Anriyani, 2025). Daerah kaya sumber daya alam dengan pertumbuhan penduduk tinggi justru mengalami pembangunan wilayah yang lebih lambat karena terjadinya *Dutch disease* dan lemahnya *governance* (Widjojanto, 2021). Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan pembangunan, tetapi interaksinya dengan kebijakan fiskal dan struktur ekonomi wilayah yang lebih menentukan.

### **Evaluasi Kebijakan dan Transformasi Energi**

Tekanan pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan energi mendorong perlunya transformasi kebijakan yang lebih adaptif. Peningkatan kebutuhan energi rumah tangga akibat penambahan penduduk belum diimbangi oleh percepatan transisi energi hijau (Umar, 2025). Daerah dengan kepadatan tinggi seperti Jabodetabek masih menggantungkan 85 persen kebutuhan listriknya pada pembangkit fosil, yang berkontribusi pada polusi udara dan emisi karbon. Pelayanan publik di tingkat kelurahan, seperti pembuatan surat pengantar nikah, mengalami peningkatan volume permintaan seiring pertumbuhan penduduk usia muda, namun kualitas responsivitas birokrasi masih rendah karena keterbatasan sumber daya manusia (Faridah & Hayati, 2021).

Pemerintah daerah belum memiliki instrumen kebijakan yang memadai untuk mengelola dampak lingkungan dari pertumbuhan penduduk (Habibi, 2015). Minimnya penelitian kuantitatif berbasis data demografi mikro menyebabkan kebijakan pembangunan wilayah

seringkali bersifat generalis dan tidak tepat sasaran (Afifah, 2022). Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara perencanaan tata ruang, kebijakan kependudukan, dan transformasi energi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Tanpa itu, pertumbuhan penduduk akan terus menjadi beban struktural yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan wilayah yang adil dan berkelanjutan.

### **Dinamika Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Wilayah**

Temuan mengenai ketimpangan pembangunan wilayah sejalan dengan teori desentralisasi asimetris, di mana daerah dengan kapasitas fiskal dan administrasi yang lemah tidak mampu memanfaatkan bonus demografi (Hadju dkk., 2021). Kebijakan desentralisasi di Indonesia cenderung bersifat *one-size-fits-all*, tanpa mempertimbangkan karakteristik demografi masing-masing daerah (Santi & Iskandar, 2021). Akibatnya, daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi justru mengalami *fiscal stress* karena belanja publik untuk layanan dasar membengkak, sementara pendapatan asli daerah tumbuh lambat. Ketimpangan PAD semakin melebar ketika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi oleh pergeseran sektor ekonomi berbasis ekspor (Kurniawan dkk., 2025).

Redesain kebijakan desentralisasi yang lebih responsif terhadap dinamika kependudukan sangat diperlukan. Formula bagi hasil yang memasukkan variabel laju pertumbuhan penduduk sebagai faktor penambah alokasi dana perimbangan perlu segera diimplementasikan (Baidhowah, 2022). Penguatan kapasitas aparatur daerah dalam analisis demografi proyektif merupakan prasyarat mutlak agar perencanaan pembangunan tidak tergerus oleh lonjakan penduduk yang tidak terprediksi (Genoveva, 2022). Tanpa integrasi antara kebijakan desentralisasi dan manajemen kependudukan, ketimpangan pembangunan wilayah akan terus menjadi masalah struktural yang kronis.

### **Evaluasi Kritis Otonomi Daerah dalam Bonus Demografi**

Otonomi daerah gagal memanfaatkan bonus demografi secara optimal (Ardiansyah, 2025). Secara teoritis, bonus demografi seharusnya menjadi momentum akselerasi pembangunan karena meningkatnya rasio penduduk produktif (usia 15-64 tahun) dibandingkan usia non-produktif. Namun, banyak daerah justru terjebak dalam *demographic dividend trap* karena tidak mampu menciptakan lapangan kerja formal yang cukup. Akar masalahnya terletak pada lemahnya koordinasi antara perencanaan tata ruang, investasi sektoral, dan kebijakan ketenagakerjaan (Suriadi dkk., 2024). Pemerintah daerah cenderung membuat rencana pembangunan yang ambisius tetapi tidak dilengkapi dengan analisis daya dukung wilayah terhadap penambahan penduduk.

Anggaran pendidikan daerah seringkali menjadi korban dari tekanan fiskal akibat pertumbuhan penduduk (Runiasih & Ahmad, 2025). Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang partisipatif belum efektif menjangkau aspirasi kelompok usia muda yang jumlahnya terus bertambah (Kholik, 2020). Pendekatan *demographic mainstreaming* dalam setiap tahap perencanaan daerah, mulai dari perencanaan strategis hingga penganggaran, sangat mendesak untuk diterapkan. Tanpa itu, otonomi daerah hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara nominal tetapi tidak mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah secara substantif.

### **Tekanan Penduduk dan Kualitas Layanan Publik**

Penurunan kualitas layanan publik akibat tekanan penduduk menjadi fenomena yang meluas (Putri, 2025). Peningkatan jumlah penduduk tanpa diikuti oleh penambahan kapasitas pelayanan (rasio pegawai, sarana prasarana, dan anggaran) menyebabkan penurunan kualitas secara gradual. Fenomena ini paling terasa di sektor-sektor padat permintaan seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan (Edison, 2023). Kesejahteraan masyarakat daerah tidak meningkat secara signifikan meskipun transfer fiskal dari pusat terus bertambah karena dana tersebut "tersedot" untuk menutup defisit layanan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terencana (Rachmad dkk., 2023).

Banyak penelitian tentang ketimpangan pembangunan masih menggunakan data agregat sehingga mengabaikan variasi intra-regional (Ali dkk., 2022). Di Jawa Timur, kemiskinan tidak terkonsentrasi di wilayah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi, tetapi di wilayah dengan kualitas sumber daya manusia terendah (Tirta & Putri, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk hanyalah variabel antara; penyebab fundamentalnya adalah rendahnya investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi. Kebijakan *people follow job* lebih realistis daripada *job follow people* dalam konteks Indonesia saat ini (Lestari dkk., 2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus fokus pada penciptaan ekosistem investasi yang pro-pertumbuhan lapangan kerja, bukan sekadar membangun infrastruktur fisik yang mahal.

### **Kebijakan Energi dan Lingkungan di Tengah Tekanan Penduduk**

Kebijakan energi dan lingkungan belum selaras dengan realitas pertumbuhan penduduk (Habibi, 2015). Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, setiap tambahan penduduk berarti tambahan konsumsi energi, produksi sampah, dan emisi karbon. Target energi terbarukan nasional sebesar 23 persen pada 2025 sangat sulit dicapai karena ketergantungan pada pembangkit batu bara masih dominan, terutama di wilayah padat penduduk (Muhayatul & Umar, 2025). *Natural resource curse* juga terjadi dalam konteks energi di daerah penghasil

batu bara seperti Kalimantan Timur, di mana pertumbuhan penduduk tinggi justru diikuti oleh degradasi lingkungan tanpa peningkatan kesejahteraan yang berarti (Rahma dkk., 2021).

Perencanaan energi dan tata ruang perlu disatukan dalam satu dokumen perencanaan daerah yang mengikat secara hukum (Suhardi & Panjaitan, 2025). Otonomi daerah seharusnya memberikan ruang bagi inovasi kebijakan energi terbarukan berbasis potensi lokal (matahari, angin, mikrohidro), tetapi implementasinya terhambat oleh birokrasi yang kaku dan minimnya insentif fiskal (Habibi, 2015). Transformasi energi tidak bisa hanya menjadi agenda nasional tanpa diterjemahkan ke dalam rencana aksi daerah yang mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk 20-30 tahun ke depan. Tanpa itu, tekanan lingkungan akan semakin tidak terkendali dan pembangunan wilayah akan kehilangan daya dukung ekologisnya.

### **Pembangunan Wilayah yang Responsif terhadap Dinamika Penduduk**

Solusi atas masalah ketimpangan pembangunan wilayah tidak dapat bersifat parsial, tetapi harus merupakan kombinasi antara kebijakan redistribusi fiskal, perencanaan tata ruang yang adaptif, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah (Kurniawan dkk., 2025). Model desentralisasi yang *asymmetric* dan *dynamic* sangat diperlukan, di mana daerah dengan pertumbuhan penduduk ekstrim (baik sangat tinggi maupun sangat rendah) mendapatkan perlakuan khusus dalam formula dana perimbangan (Baidhowah, 2022). Investasi jangka panjang pada pendidikan dan kesehatan reproduksi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dari hulu juga sangat penting (Runiasih & Ahmad, 2025).

Pembangunan wilayah yang berkeadilan tidak bisa mengabaikan fakta demografi (Putri, 2025). Setiap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD) wajib menyertakan kajian proyeksi penduduk dan daya dukung wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan (Suhardi & Panjaitan, 2025). Teori-teori pembangunan ekonomi kontemporer mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang moderat dengan kualitas tinggi adalah aset, bukan beban (Lestari dkk., 2021). Agenda ke depan adalah mengubah paradigma dari sekadar "mengendalikan jumlah" menjadi "meningkatkan kualitas dan mendistribusikan secara merata". Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, pengaruh negatif pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan wilayah dapat diminimalisir, dan potensi bonus demografi dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan bersama.

### **Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Strategi pertama yang paling fundamental dalam mengelola pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan wilayah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Perguruan tinggi di Indonesia memiliki

peran strategis dalam mencetak SDM unggul yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama di tengah tekanan demografi yang semakin meningkat. Pendidikan merupakan instrumen utama dalam pembangunan ekonomi, karena SDM yang terdidik cenderung lebih produktif dan inovatif sehingga dapat mengubah beban pertumbuhan penduduk menjadi modal pembangunan. Lebih lanjut, pendidikan karakter harus diintegrasikan ke dalam kurikulum agar generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki integritas, etos kerja, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Pembangunan ekonomi di era modern sangat bergantung pada kualitas SDM, dan pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas pendidikan akan menyebabkan stagnasi ekonomi wilayah (Abdillah, 2024).

Selain pendidikan formal, strategi pelatihan vokasi dan peningkatan kapasitas berkelanjutan juga menjadi kunci. Keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi menjadi tuntutan mutlak dalam pengembangan SDM di era revolusi industri 4.0. Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah dengan pertumbuhan penduduk muda yang tinggi. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pembelajaran sangat direkomendasikan untuk membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dengan strategi ini, tekanan pertumbuhan penduduk dapat diubah menjadi bonus demografi yang nyata, bukan menjadi beban struktural (Zulfikar, 2021).

### **Penguatan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal**

Strategi kedua adalah mengarahkan pertumbuhan penduduk, khususnya kelompok usia produktif, ke dalam sektor ekonomi kreatif dan kewirausahaan yang berbasis pada potensi lokal masing-masing wilayah. Kewirausahaan di era globalisasi memiliki peran sentral dalam memajukan perekonomian Indonesia karena mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri tanpa harus bergantung pada sektor formal yang terbatas. Ketahanan berwirausaha dan daya hidup usaha kecil dan menengah (UKM) sangat penting untuk menciptakan SDM unggul yang tidak mudah menyerah di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. UMKM memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi kreatif di era revolusi 5.0, sekaligus menjadi jembatan menuju ekonomi global yang lebih inklusif (Rasyiqah, 2023).

Implementasi strategi ini memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat di tingkat desa dan kota. Optimalisasi peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi tetapi terbatas akses ke lapangan kerja formal. Pengembangan

ekonomi kreatif juga sangat direkomendasikan untuk meningkatkan potensi pariwisata daerah, yang pada gilirannya menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi urbanisasi berlebihan ke kota-kota besar. Dengan pendekatan ini, potensi lokal dapat menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Hayati, 2022).

### **Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan**

Strategi ketiga difokuskan pada penanganan kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak oleh tekanan pertumbuhan penduduk, yaitu penduduk miskin perkotaan dan pedesaan. Modal penghidupan (livelihood capital) seperti modal manusia, sosial, finansial, fisik, dan alam sangat menentukan strategi bertahan hidup penduduk miskin perkotaan, termasuk para pengemis di kota-kota besar Indonesia. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya bersifat karitatif, tetapi harus berupa pemberdayaan berbasis aset dan peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, serta permodalan usaha mikro (Samson, 2025).

Pada level operasional, strategi pemberdayaan masyarakat rentan harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Program bantuan sosial tidak boleh dipisahkan dari program pengembangan keterampilan, karena kemiskinan struktural akibat tekanan penduduk memerlukan solusi jangka panjang, bukan sekadar bantuan tunai sementara. Keberlangsungan UKM yang dikelola oleh masyarakat miskin sangat bergantung pada ketahanan berwirausaha dan akses terhadap pendampingan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, masyarakat rentan dapat keluar dari jerat kemiskinan meskipun tinggal di wilayah dengan tekanan pertumbuhan penduduk yang tinggi (Sunarto, 2024).

### **D. KESIMPULAN**

Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh ganda terhadap pembangunan wilayah di Indonesia. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi oleh distribusi sumber daya fiskal yang memadai, kapasitas pemerintah daerah yang kuat, serta perencanaan tata ruang yang adaptif justru memperlebar ketimpangan pembangunan antar wilayah. Daerah dengan laju pertumbuhan penduduk cepat tetapi struktur ekonomi lemah terjebak dalam lingkaran kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, penurunan kualitas layanan publik, serta degradasi lingkungan dan energi. Sebaliknya, daerah dengan pertumbuhan penduduk stabil dan didukung oleh desentralisasi yang responsif terhadap dinamika demografi mampu mengalokasikan belanja pembangunan secara lebih efektif dan merata.

Untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi dan meminimalkan dampak negatif pertumbuhan penduduk, diperlukan strategi terpadu yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan berbasis potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat rentan. Model desentralisasi yang asimetris dan dinamis, integrasi proyeksi penduduk ke dalam setiap dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RTRW), serta transformasi energi hijau yang berkeadilan menjadi keharusan. Pada akhirnya, pertumbuhan penduduk yang moderat dengan kualitas tinggi adalah aset, bukan beban, asalkan dikelola dengan kebijakan berbasis data dan berorientasi jangka panjang.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, F. (2024). Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. *EDUCAZIONE: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 13-24.
- Abdillah, F., & Ramadhan, Y. M. (2023). Pengaruh pembangunan ekonomi terhadap sumber daya manusia di Indonesia pada era modern. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 1(2), 54-68.
- Afandi, M. R., Kamdani, & Ardiansyah. (2025). Otonomi daerah sebuah kajian literature review. *JOURNAL OF LITERATURE REVIEW*, 1(1), 211-217.
- Aji, J. S., Retnaningdiah, D., & Hayati, K. (2022). Optimalisasi peran dan fungsi BUMDes Astaguna dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Trihanggo. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 7(2), 155-162.
- Alfarizi, M., & Herdiansyah, H. (2024). Innate green propensity: Precursors of ecopreneurial intentions among Indonesian education human resources university. *The International Journal of Management Education*, 22(2), 100977. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2024.100977>
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif dan penerapannya dalam penelitian. *Education Journal*, 2(2).
- Amin, C., Pramono, W. T., Jumadi, J., Sari, D. N., & Samson, M. G. M. (2025). Navigating urban poverty: The role of livelihood capital in the livelihood strategies of urban beggars in Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101298. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101298>
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1-16.

- Baidhowah, A. R. (2022). Explaining decentralization performance in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14, 97-109.
- Batubara, N. Z., & Tambunan, K. (2022). Analisis peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi Islam melalui sumber daya manusia pasca pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 6(1), 8-13.
- Boentolo, F., Manu, C. C. C. R., Saragih, O. G., & Zalukhu, S. (2024). Peran guru memanfaatkan AI dalam membangun generasi unggul menuju Indonesia emas 2045. *Aletheia Christian Educators Journal*, 5(1), 42-48.
- Edison. (2023). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sosial: Tinjauan terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. *Jurnal Development*, 11(2), 134-147.
- Faridah, H., & Hayati, R. (2021). Kualitas pelayanan pembuatan surat pengantar nikah dilihat dari aspek responsiveness (ketangapan) pada Kantor Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4(2), 1041-1051.
- Genoveva, P. L. (2022). Implementasi desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8, 244-251.
- Habibi, M. M. (2015). Analisis pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah kota/kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Hadju, I. I., Masinambow, V. A., & Maramis, M. T. B. (2021). Analisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1), 110-120.
- Hardi, I., Afjal, M., Can, M., Idroes, G. M., Noviandy, T. R., & Idroes, R. (2024). Shadow economy, energy consumption, and ecological footprint in Indonesia. *Sustainable Futures*, 8, 100343. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100343>
- Khairiyah, U., & Dewinda, H. R. (2022). Peran pendidikan karakter dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu. *Psyche 165 Journal*, 119-124.
- Kholik, S. (2020). Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1).
- Kristiyanti, M., Kundori, K., & Hermawati, R. (2023). Membangun sumber daya manusia dan teknologi informasi sebagai dasar kejayaan maritim di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi Maritim*, 23(2), 109-122.
- Kurniawan, M., Noviarita, H., & Anriyani, Y. (2025). Pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal dan pergeseran sektoral terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah area Sumbagsel dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2015-2023. *EDUNOMIKA*, 9(2), 1-14.
- Latif, L., Kamaludin, K., & Sunarto, A. (2024). Ketahanan berwirausaha, daya hidup UKM dan

- keberlangsungan dalam menghadapi persaingan usaha untuk menciptakan SDM yang unggul. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS)*, 4(2), 81-89.
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Oktariani, N. (2021). Teori pembangunan ekonomi. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 113-128.
- Mardhiyah, R. H., Aldriani, S. N. F., Chitta, F., & Zulfikar, M. R. (2021). Pentingnya keterampilan belajar di abad 21 sebagai tuntutan dalam pengembangan sumber daya manusia. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 29-40.
- Mas'ud, L. P., & Susilo, M. Y. (2023). Peran UMKM dalam membangun dan menumbuhkan ekonomi kreatif di era revolusi 5.0 menuju ekonomi global. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 6(2), 266-275.
- Masudin, I., Tsamarah, N., Restuputri, D. P., Trireksani, T., & Djajadikerta, H. G. (2023). The impact of safety climate on human-technology interaction and sustainable development: Evidence from Indonesian oil and gas industry. *Journal of Cleaner Production*, 434, 140211. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140211>
- Mohamad, G. (n.d.). Desentralisasi dan otonomi daerah (pp. 1-9).
- Muhayatul, M., & Umar, G. (2025). Transformasi energi terbarukan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan: Studi evaluatif atas kebijakan dan implementasi di Indonesia. *TASE: Jurnal Transformasi dan Studi Ekonomi*, 3(1). <https://doi.org/10.71383/tase.v3i1.83>
- Pancawati, A. P. A., & Widaswara, R. Y. (2023). Pengembangan ekonomi kreatif dalam meningkatkan potensi pariwisata. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 166-178.
- Rachmad, A. F., Xusan, Q. N., Azzahra, N., & Azaria, E. (2023). Pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(2), 75-88.
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021). Fenomena natural resource curse dalam pembangunan wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.10>
- Rasyiq, D., Zamhari, A., Yahya, M., Daniyasti, N., & Fitriani, A. (2023). Peran kewirausahaan di era globalisasi dalam memajukan perekonomian di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 953.
- Romawati, A., & Nisa, F. L. (2024). Peran pendidikan dan pelatihan dalam membangun kapasitas pelaku industri kreatif di Indonesia. *Jurnal Inovasi Bisnis Indonesia (JIBI)*, 1(4), 209-215.

- Runiasih, M., & Ahmad, M. (2025). Ketimpangan pembiayaan pendidikan antar daerah di Indonesia: Kajian literatur terhadap desentralisasi fiskal dan pemerataan akses. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 839-843.
- Samputra, P. L., & Alfarizi, M. (2025). Can advanced society 5.0 technology create economic and social value for millennial and generation Z MSMEs in Surabaya, Indonesia? An economic resilience perspective. *Asia Pacific Management Review*, 100355. <https://doi.org/10.1016>
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan desentralisasi dan ketimpangan capaian pembangunan wilayah di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 490-506.
- Suhardi, & Panjaitan, P. (2025). Analisis strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 42-55.
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. I. (2024). Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: Menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 27-36.
- Tirta, B. W., & Putri, R. N. H. (2025). Pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(2), 1500-1511.